

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Krisis ekonomi yang melanda belahan dunia pada tahun 1997 telah mengguncang negara-negara di dunia khususnya negara-negara di Asia yang tergolong ke dalam negara dunia ketiga. Negara-negara anggota ASEAN yang berada pada kawasan Asia Tenggara tidak luput dari krisis tersebut. Justru kawasan inilah yang mengalami krisis yang cukup parah dengan ditandai macetnya roda perekonomian, banyaknya pengangguran, anjloknya nilai tukar untuk uang dalam negeri terhadap nilai tukar dolar AS. Hal ini dapat terbukti dengan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia, dimana krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah membawa kondisi bangsa Indonesia terpuruk sampai merembet ke krisis moral dan krisis sosial politik.

ASEAN sebagai salah satu organisasi regional kawasan yang menggabungkan negara-negara berbeda di kawasan Asia Tenggara, dimana salah satu maksud dan tujuannya terdapat dalam Deklarasi Bangkok, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi¹. Dengan kerja sama ekonomi ini diharapkan tercipta integrasi ekonomi untuk memperkokoh perekonomian anggotanya. Sehingga diharapkan negara-negara anggota punya posisi tawar dengan negara-negara yang sudah maju.

Pada abad 21 ini Negara-negara anggota ASEAN diharapkan pada kondisis liberalisasi perdagangan dunia yaitu sejak adanya Putaran Uruguay sampai terbentuknya

¹ Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 4.

GATT dan berkembang menjadi WTO yang berimplikasi pada upaya ASEAN untuk mengikuti kondisi tersebut untuk pembentukan AFTA yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing barang-barang manufaktur negara-negara anggota ASEAN di pasar dunia². Tujuan lain adalah untuk mempromosikan investasi asing langsung ke negara-negara ASEAN dan investasi antar anggota. Untuk melaksanakan hal tersebut disepakati CEPT (Common Effective Preferential Tariff) yang bertujuan meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi secara lebih cepat melalui pemberian tarif pada produk-produk yang sama hasil produksi negara-negara anggota ASEAN³.

Selain masalah liberalisasi perdagangan dunia tahun 1990-an juga terjadi perubahan sifat organisasi internasional yang dulunya bersifat politis pertahanan berubah sifat ekonomis. Hal ini ditandai dengan munculnya regionalisme seperti APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang berdiri tahun 1989, NAFTA (North America Free Trade) pada tahun 1992, Uni Eropa yang berdiri tahun 1993 setelah ditandatanganinya Perjanjian Maastricht.

Dengan melihat perubahan dalam tata hubungan kerja sama cenderung mengarah ke bentuk-bentuk integrasi maka ASEAN berupaya untuk mengarahkan kerja sama ekonomi untuk mewujudkan integrasi ekonomi regional, sejauh mana upaya yang telah dilakukan ASEAN akan menjadi kajian yang menarik .

² Prospek Peningkatan Kerja Sama Antar Negara ASEAN Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri, *ASEAN Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Seknas ASEAN, Jakarta, 1996-1997, hal.8.

³ *Ibid*, hal.9.

1.2. Latar Belakang Masalah

Pratisipasi Indonesia dalam percepatan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 yang dilakukan bersama-sama dengan kelima negara pertama penandatanganan Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (Basic Agreement on the Common Effective Preferential Tariff / CEPT), menjadi menarik karena keputusan itu dibuat pada Indonesia tidak lagi mempunyai stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Krisis ekonomi Indonesia semula berawal dari terdepresinya mata uang Thailand, bath pada pertengahan tahun 1998. Krisis ini kemudian menghancurkan sendi-sendi perekonomian nasional, sehingga kondisi makroekonomi Indonesia menjadi tidak stabil dan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya terus mengalami peningkatan, menjadi turun drastis. Untuk mengembalikan kondisi perekonomiannya ini, Indonesia bersama-sama dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Brunai Darussalam sepakat untuk memajukan jadwal pelaksanaan AFTA menjadi tahun 2002.

Selama ini perdagangan bebas oleh banyak pihak dipandang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara, karena dengan semakin menurunnya hambatan-hambatan perdagangan, baik yang sifatnya tarif maupun non tarif, maka lalu lintas perdagangan akan menjadi semakin lancar dan volumenya menjadi semakin bertambah. Hal inilah yang diinginkan oleh negara-negara ASEAN yang sebagian besar mengalami krisis ekonomi dengan Indonesia dengan kasus yang paling parah.

Dengan penghapusan hambatan perdagangan diantara negara-negara ASEAN, maka lalu lintas perdagangan diantara negara-negara tersebut menjadi semakin lancar dan volumenya juga meningkat. Hal ini selanjutnya bisa menggairahkan kembali

perekonomian nasional yang mengalami stagnasi akibat krisis ekonomi. Pemikiran inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk menyetujui pengajuan jadwal AFTA menjadi tahun 2002, karena dengan semakin cepatnya realisasi perdagangan bebas, maka manfaatnya juga semakin cepat dirasakan.

Sebenarnya keputusan Indonesia untuk mempercepat jadwal pelaksanaan AFTA dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi nasionalnya bisa dinilai terlalu “memaksa”, sebab persiapan Indonesia untuk menuju realisasi AFTA dalam masa krisis sangat kurang. Dua hal yang diperlukan untuk bisa masuk dalam sistem perdagangan bebas yaitu kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi tidak terpenuhi. Selain belum terpenuhinya dua hal tersebut, ketidaksiapan Indonesia untuk masuk dalam perdagangan bebas ASEAN juga terlihat dari pelaksanaan CEPT dan posisi Indonesia dalam perdagangan intra-ASEAN, sebagai contoh produk Indonesia yang masuk dalam *temporary exclusion list* pada tahun 1998 adalah paling besar, yaitu sejumlah 541 jenis produk. Jenis produk-produk ini belum bisa dikenakan tarif 0-5% sesuai target AFTA pada tahun 2003, apalagi jika dimajukan pada tahun 2002, karena produk-produk tersebut masih merupakan hasil dari *infant industry* di Indonesia, sehingga masih terus diberi proteksi.

Dalam kondisi yang demikian itulah keenam negara anggota pertama ASEAN sepakat untuk memajukan jadwal perdagangan bebas di kawasan tersebut. Padahal realisasi AFTA memerlukan persiapan, baik dari ASEAN sebagai satu kesatuan maupun dari masing-masing negara anggota yang nantinya terlibat dalam AFTA. Dengan adanya kesepakatan percepatan AFTA bagi keenam negara ASEAN itu, berarti keenam negara ASEAN tersebut harus mempersiapkan landasan perekonomiannya sehingga menjadi

lebih mantab untuk memenuhi komitmen tersebut, karena untuk terlibat dalam perdagangan bebas dibutuhkan dua hal mendasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi masing-masing negara.⁴

Sebelum terjadinya krisis ekonomi, dua hal yang telah disebutkan di atas, memang sudah ada di Indonesia. Hal ini terlihat dari dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak dicetuskannya AFTA pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. dalam masa itu pula, stabilitas makroekonomi nasional terjamin, sehingga para investor baik dalam maupun luar negeri banyak yang yakin atas prospek perekonomian di Indonesia. Hal tersebut menarik cukup banyak modal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Akibatnya, perekonomian nasional pada masa itu berada pada tingkat yang menggembirakan.

Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara ASEAN yang lain, sehingga secara umum, prospek perekonomian ASEAN menjadi sangat bagus dan menarik banyak investasi dari luar ASEAN. Dalam kondisi yang demikian, para pemimpin negara-negara ASEAN sendiri maupun dengan negara-negara lain di luar kawasan Asia Tenggara, sehingga untuk lebih menggairahkan kegiatan perdagangan dan investasi di kawasan ini para menteri ekonomi negara-negara ASEAN, dalam sidangnya yang ke-26 di Chiang Mai, Thailand pada tanggal 22-23 September 1994 sepakat untuk merealisasikan AFTA lima tahun lebih awal dari jadwal sebelumnya, artinya AFTA yang sedianya akan direalisasikan pada tahun 2008, berdasarkan kesepakatan tersebut, akan direalisasikan

⁴ Faisal Yuniarto dan Umar Faruk "Prospek Perdagangan ASEAN Menjelang AFTA 2003" dalam *Bhiwara*, 23 September 1996.

lebih awal, yaitu tahun 2003. dengan dimajukan jadwal pelaksanaan AFTA ini, maka ASEAN diharapkan menjadi kawasan yang lebih menarik bagi investasi asing.

Jika dibandingkan dengan kondisi masa itu, kondisi negara-negara ASEAN pada saat krisis ekonomi, terutama Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina jauh berbeda. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi mengalami penurunan drastis. Dalam situasi yang demikian, kebijakan yang ditempuh oleh para pemimpin negara ASEAN adalah justru melalui percepatan jadwal perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara satu tahun lebih awal, terutama bagi keenam negara intinya termasuk Indonesia.

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang, adalah masalah kemiskinan dan rendahnya kualitas SDM, tak kurang dari 1 milyar jiwa masih terbenam hidup di bawah garis kemiskinan serta langka sumber daya dan tertinggal dalam segala hal.⁵

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang memiliki penduduk paling besar tidak dapat disangkal bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN. Keadaan ini bisa disebabkan karena fasilitas penduduk masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang demikian besar.⁶

Selain itu muncul kekhawatiran terhadap kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi era penuh kompetisi dalam menghadapi perdagangan dunia tersebut adalah tidak dapat diabaikan, kualitas SDM tidak hanya sangat tertinggal

⁵ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Peluang dan Kendala*, (Jakarta: Erlangga, 1995), hal. 217.

⁶ Cahya Agung Widada, *Latar Belakang Indonesia Menerima AFTA*, (Yogyakarta: Skripsi Sarjana, UMY, 1996), hal. 61-62.

dibandingkan dengan negara-negara maju, tetapi juga agak terbelakang dibandingkan dengan sesama negara sedang berkembang lainnya.⁷

Karena sejalan dengan perubahan struktur produksi, peranan pendidikan dalam pembangunan harus ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan oleh industrialisasi yang mendorong sebagian besar angkatan kerja sektor pertanian berusaha pindah ke sektor industri dan jasa. Perbedaan teknologi yang digunakan di sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa mengharuskan tenaga kerja sektor pertanian memperoleh hambatan pendidikan atau pertanian yang berbeda.

Penekanan sumber daya manusia dalam pembangunan jangka panjang II merupakan langkah yang tepat. Tenaga kerja merupakan faktor industri yang dimiliki Indonesia dalam jumlah yang besar, namun demikian kebanyakan dari mereka dapat digolongkan sebagai tenaga tidak terampil atau terdidik.

Pada tahun 1990 hanya 21,9% angkatan kerja yang berpendidikan SLTP atau lebih padahal proses industrialisasi tak pelak lagi membutuhkan tenaga terampil atau terdidik yang tidak sedikit jumlahnya. Kalau pendidikan atau ketrampilan angkatan kerja (yang tersedia dalam jumlah yang besar) bukannya mempercepat melainkan bisa memperlambat proses transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa. Dengan demikian, investasi dalam bidang pendidikan tampaknya merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan lagi.⁸

Di tahun 1996 sumber daya manusia Indonesia menduduki daya saing ke-41 di dunia. Diantara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia berada pada tingkat terendah

⁷ Mohtar, Mas' oed, *Dilema Kapitalisme Perekonomian* (Yogyakarta: IDEA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999), hal. 81-82.

⁸ Moh Arsjad Anwar, dkk, *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek, Daya Teknologi dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 125.

dibandingkan dengan Malaysia berada pada posisi ke-23, Thailand pada posisi ke-31.

⁹Indonesia juga termasuk salah satu diantara 8 negara raksasa yang dianggap gagal dalam pelaksanaan pendidikan dasar bagi masyarakat. ¹⁰

Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia menduduki urutan ke-109 dari 174 negara dalam pembangunan sumber daya manusia. Posisi tersebut jauh di bawah Thailand yang berada di posisi ke-41, Malaysia pada posisi ke-53 dan Filipina pada posisi ke-95.

Selain itu anggaran pendidikan negara Indonesia sendiri dianggap kurang apabila dibandingkan dengan anggaran pendidikan negara ASEAN lainnya. Anggaran pendidikan Indonesia pada tahun 2000 dalam APBN disediakan 6% lebih, tetapi pada tahun 2001 turun menjadi hanya 4,6%. Sebagai perbandingan adalah negara Malaysia pada tahun 2000 menyediakan 12% lebih sedangkan pada tahun 2001 pemerintah Malaysia menyediakan 16% untuk pendidikan. Thailand mengalokasikan 22% anggaran belanjanya untuk pendidikan. UNESCO menetapkan minimal 4% *Gross Domestic Product* (GDP) untuk pendidikan.

Sejak bulan Maret 1996, perekonomian Indonesia memasuki era pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam Orde Baru ini perhatian mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan melalui pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air.

Sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu krisis ekonomi dan moneter menimpa perekonomian nasional Indonesia. Pemerintah dengan berbagai upaya berusaha untuk menerapkan kebijakan ekonominya melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang

⁹ Menurut Data East-West Center Data Base.

¹⁰ Kemakmuran PB PGRI, Pro. Dr. Muh Surya, *Karena Gagal Dalam Pendidikan*, Suara Merdeka., Rabu, 9 Mei 2001, (Wawancara)

perekonomian nasional. Kebijakan yang diambil pemerintah tersebut seperti memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita, pemerataan hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran serta menekan laju inflasi, sehingga nantinya akan mencapai hasil yang diinginkan.

Bagi Indonesia, yang menjadi pertimbangan paling mendasar adalah kepentingan pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan masalah perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN. Dalam hal ini, pemerintah secara terus menerus berusaha meningkatkan dan mengembangkan ekspor. Usaha peningkatan ekspor ini akan lebih berhasil jika kebijakan yang ditempuh adalah “outward looking” untuk dapat memajukan pasaran ekspor yang lebih luas sehingga hasil yang diperoleh seperti yang diharapkan.

Disini bisa dilihat bahwa ternyata bagi pihak pemerintah Indonesia, AFTA dapat dipandang sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan. Akan tetapi karena berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi Indonesia terutama dari faktor internal maka kesiapan Indonesia untuk menghadapi pemberlakuan kawasan perdagangan bebas mendatang dirasa belum bisa maksimal.

Sehingga dalam menghadapi AFTA mendatang, pemerintah Indonesia harus berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat laju pasar bebas 2003 nanti, dimana jasa-jasa profesional akan banyak menyerbu Indonesia. Selain itu peningkatan kestabilan politik dan perbaikan kondisi perekonomian Indonesia sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sedangkan dari segi PMA di Indonesia ternyata mengalami penurunan di saat terjadinya krisis moneter. Kenyataan bahwa tingkat volume perdagangan intra-ASEAN yang masih rendah menjadi salah satu

faktor penghambat bagi Indonesia untuk berinteraksi dengan negara-negara anggota ASEAN sehingga pertukaran di kawasan ini bisa lebih maksimal.

Pada akhirnya, upaya pemerintah Indonesia dalam proses integrasi ekonomi regional dan internasional akan membawa manfaat apabila pemerintah Indonesia serius dalam memperbaiki kondisi sosial politik maupun ekonomi dalam negeri dan pada saat yang bersamaan diupayakan pula integrasi ekonomi nasionalnya.

1.3. Permasalahan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan diatas, maka ada hal yang menarik untuk melihat secara cermat mengenai kebijakan Indonesia untuk berpartisipasi dalam percepatan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002, justru pada saat Indonesia tidak lagi memiliki kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi.

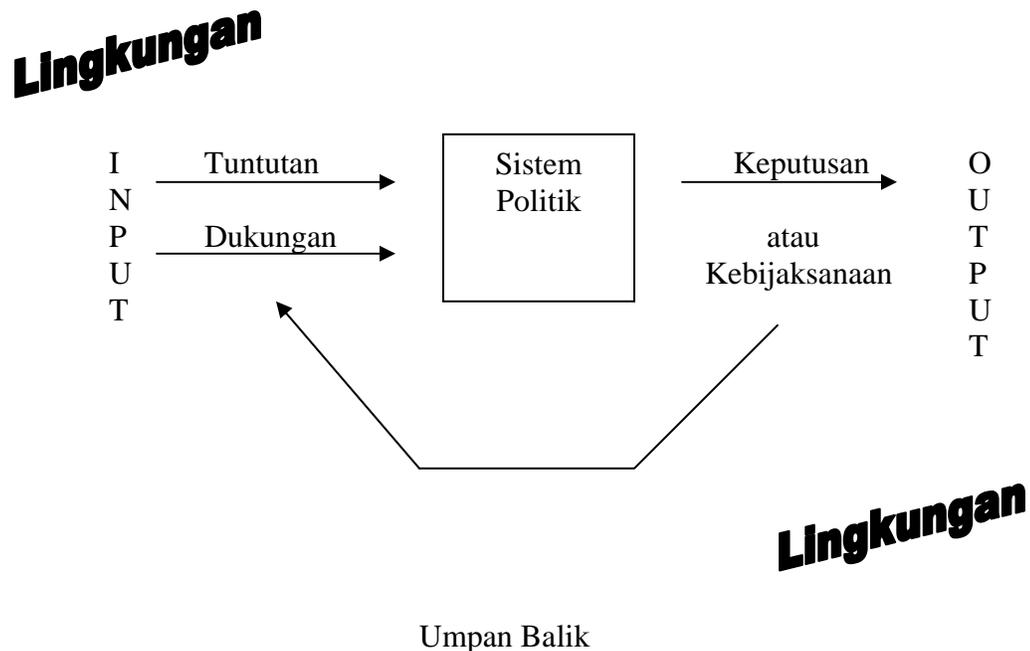
Jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa Indonesia turut berpartisipasi dalam percepatan AFTA dari 2003 ke 2002 ?

1.4. Kerangka Pemikiran

Melihat permasalahan diatas, penulis akan mencoba mendeskripsikannya dengan menggunakan teori yang digunakan oleh David Easton dalam Mochtar Mas' oed dan Colin Mac. Andrews yaitu tentang Analisa Sistem Politik

Untuk lebih jelas tentang teori ini, penulis akan menggambarkan skema dari sistem yang dimaksud.

Gambar 1.1
Analisa Sistem Politik



Sumber: Mochtar Mas'ood dan Colin Mac. Andrews: Perbandingan Sistem Politik. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1993.hal, 5

Dari skema diatas, Input terbagi dalam dua jenis yang berbeda, yaitu Tuntutan dan Dukungan. Tuntutan adalah keinginan dari orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan. Bila tuntutan atau kehendak-kehendak itu disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat maka tuntutan-tuntutan itu telah menjadi input-input bagi sistem politik.

Dukungan merupakan suatu energi bagi sistem politik. Input yang berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Tuntutan hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk akhir, yang disebut keputusan. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul didalamnya, dan keputusan-keputusan

yang dihasilkannya. Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik tujuan tidak akan terselesaikan. Dukungan ini biasanya dari rezim, komunitas dan pemerintah.

Dari dukungan dan tuntutan yang merupakan input dari sistem politik akan terjadi suatu proses yang menghasilkan output. Output adalah keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan. Maka pada pemerintah terletak tanggung jawab besar dan tinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.

Tuntutan Kondisi sosial ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis ekonomi membutuhkan jalan keluar, dengan situasi semacam ini Indonesia dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonominya dengan segera, dan akhirnya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya Indonesia kemudian ikut berpartisipasi dalam percepatan jadwal liberalisasi perdagangan ASEAN, bersama-sama dengan kelima negara penandatanganan CEPT yang lain.

Tuntutan yang berasal dari masyarakat yaitu oleh Sofian Wanandi, berpendapat bahwa karakteristik industri di Indonesia masih di tandai oleh belum adanya persiapan yang dilakukan secara terorganisasi antara perusahaan kecil, menengah dan besar. Keberadaan pengusaha besar tidak terlepas kualitas sumber daya manusia dan dukungan dari pengusaha kecil dan menengah. Jika Indonesia sudah benar-benar masuk dalam era perdagangan bebas, pemerintah tidak bisa lagi mengeluarkan kepada pengusaha-pengusaha besar untuk membantu kehidupan dan kelancaran pengusaha kecil seperti yang dilakukan selama ini melalui berbagai pola kemitraan.¹¹ Pada saat pasar bebas nanti

¹¹ Pendapat ini disampaikan oleh Sofian Wanandi yang dikutip oleh Yan Hendik, "Kesiapan Indonesia di Pasar Bebas", dalam *Suluh*, 9 November 1996.

perhatian pengusaha besar akan terpusat pada peningkatan kualitas produksi yang dihasilkannya untuk dapat bersaing dengan perusahaan negara-negara lain, dan diakui atau tidak pasti akan meninggalkan pengusaha kecil, oleh karena itu pemerintah harus menciptakan suatu sistem yang bisa mempersatukan gerak dan langkah pengusaha kecil, menengah dan besar untuk menuju kemajuan ekonomi dalam menguasai pasar.

Selain hal-hal diatas sebagai faktor tuntutan, dukungan juga datang dari masyarakat yaitu dengan adanya berbagai analisa positif yang dilakukan oleh Tubagus Feridhanusetyawan dan Yose Rizal dengan menggunakan Model Ekuilibrium Umum Global diperoleh hasil bahwa dengan lebih terbukannya perdagangan internasional akan diperoleh tambahan kesejahteraan ekonomi yang semakin tinggi, kemudian akan memunculkan semacam optimisme pada pihak Indonesia atas keberhasilan AFTA untuk memulihkan perekonomian nasional.

Dukungan berasal dari Presiden Habibie ketika menghadiri KTT ASEAN VI di Hanoi, Vietnam, Presiden Habibie menyatakan bahwa dampak Krisis Ekonomi di kawasan Asia Tenggara sangat hebat dan pencapain AFTA melalui skema CEPT perlu dipercepat.¹² karena itu pemerintah mengeluarkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomer 158 Tahun 1983 tentang pembentukan Dewan Produktifitas Nasional, hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Dukungan dan tuntutan di atas membuat pemerintah harus segera mengambil tindakan yaitu ikut serta dalam pelaksanaan percepatan AFTA dari tahun 2003 menjadi

¹² Selengkapnya Lihat *Opening Statement by H.E. Mr. B.J. Habibie, President of Republic Indonesia, Hanoi, 15 December 1998*, dalam <http://www.aseansec.org>. diakses 9 Juni 2000.

tahun 2002 karena dengan ikut dalam percepatan tersebut maka Indonesia dapat memulihkan perekonomiannya yang porak poranda akibat krisis ekonomi.

Dari berbagai macam tuntutan dan dorongan dari segala pihak, pemerintah mulai melakukan suatu proses politik yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah kebijakan dan keputusan yang dapat segera diberlakukan di dalam maupun di luar negeri. Keputusan ini merupakan suatu output yang diharapkan dapat membawa pada kondisi yang lebih baik bagi semua pihak.

1.5. Hipotesa

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam percepatan AFTA dari tahun 2003 ke tahun 2002 dipengaruhi oleh:

1. Faktor internal, yang berupa kepentingan Indonesia untuk memulihkan perekonomiannya akibat krisis. Salah satu cara yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan di kawasan Asia Tenggara adalah realisasi AFTA dengan segera. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan serta menarik investasi asing ke Asia Tenggara.
2. Faktor eksternal, yang berupa tuntutan internasional untuk segera melakukan liberalisasi perdagangan. Bantuan IMF yang diberikan kepada Indonesia untuk menangani masalah krisis ekonomi memang harus disertai oleh komitmen Indonesia untuk menyelesaikan krisis ekonomi sesuai dengan cara-cara yang telah diajukan oleh IMF.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab:

Bab I berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Negara dan Perdagangan Bebas.

Bab III membahas tentang AFTA 2002 sebagai Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional.

Bab IV membahas tentang Kepentingan Indonesia dalam AFTA 2002: Tuntutan Internasional atas Liberalisasi Perdagangan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.